

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBEBASAN/PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II
(BBN-KB II) TAHUN 2018
(Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)**

SKRIPSI

OLEH:

RHAMA YUDHIANSYAH PUTRA
NIM.11675101889



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RHAMA YUDHIANSYAH PUTRA
NIM : 11675101889
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBEBASAN/
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PENYERAHAN II (BBN-KB II) TAHUN 2018 (Studi Pada
UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING



Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak
NIP.198308272011012004

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL



Dr. Drs. H. Moh. Said HM, M.Ag, MM
NIP.19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN
ADMINISTRASI NEGARA



Dr. Kamaruddin S. Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islan

University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RHAMA YUDHIANSYAH PUTRA
 NIM : 11675101889
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBEBASAN/
 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BEA
 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
 PENYERAHAN II (BBN-KB II) TAHUN 2018 (Studi Pada
 UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)
 HARI/TANGGAL : 24 Juni 2020

PANITIA PENGUJI
 KETUA PENGUJI

Sahwitri Tandani, SE., M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

PENGUJI I

PENGUJI II

Muslim, S.Sos., M.Si
 NIP. 19820205 201503 1 002

Ikhwani Ratna, SE., M.Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBEBASAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II (BBN-KB II) TAHUN 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)

Oleh:

RHAMA YUDHIANSYAH PUTRA

NIM.11675101889

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018, dan Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018, selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018, dan untuk mengetahui Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep operasional berdasarkan dari teori Ni Wayan Budiani (2007:53) dengan 4 (empat) indikator yaitu: Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Kuesioner (Angket). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kemudian penulis menggunakan teknik analisa data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Setelah itu adalah mengambil kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisa data yang dilakukan menunjukan bahwa belum sepenuhnya efektif kegiatan Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 dan kendala-kendala dari pihak instansi maupun dari wajib pajak (masyarakat).

Kata Kunci: Efektivitas, Pembebasan/Penghapusan, BBN-KB

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dipadang mahsyar nanti aamiin ya robbal alamin.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusinya dan dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)”*** dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Sukamdi dan Mama Wagiye tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta selalu mendoakan demi kelancara proses pembuatan skripsi ini
2. Terima kasih kepada keluarga kandung saya Kakak Ratih Gustiani, S.Pd dan Adik Hasna Khuwaidah Septarina, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak yang telah menyempatkan waktu dari kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahiddin, S.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Terima kasih kepada Ibu Weny Puji Astuti S.Sos MKP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terima kasih kepada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku Administrasi Negara Lokal E Angkatan 2016
11. Terima kasih kepada teman-teman KKN Desa Sumber Jaya Fazli, SH, Wibi, SH, Anto, S.Ikom, Andrian, ST, Elvira, ST, Nadha, S.Pd, Alya, SP, Restika, SE, Anggi, SP, dan Sistami, S.Pd.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Terima kasih kepada teman-teman satu kosku Dio, S.Sos, Zikri, S.Sos, Dedek, S.Sos, dan Fauzan, S.Sos.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari proposal ini. Akhir kata penulis berharap, semoga proposal ini dapat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca sekaligus demi menambah pengetahuan.

Pekanbaru, 23 April 2020

Penulis,

Rhama Yudhiansyah Putra
NIM. 11675101889

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Efektivitas	9
2.2 Ukuran Efektivitas	10
2.3 Pajak.....	12
2.4 Fungsi Pajak.....	13
2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.6 Pajak Daerah.....	17
2.7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).....	18
2.8 Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak	22
2.9 Pajak Dalam Pandangan Islam	23
2.10 Penelitian Terdahulu	24
2.11 Defenisi Konsep.....	27
2.12 Konsep Operasional.....	28
2.13 Kerangka Berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Metode Penelitian	31
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4	Objek Penelitian.....	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Skala Pengukuran (<i>Skala Likert</i>)	37
3.7	Analisis Data.....	37
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1	Sejarah Kota Pekanbaru.....	39
4.2	Geografis.....	41
4.3	Sejarah Singkat Berdirinya UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota	43
4.4	Visi Dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.....	45
4.5	Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.....	46
4.6	Uraian Tugas Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian	46
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
51.	Identitas Responden.....	51
52.	Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018	54
53.	Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II).....	92
BAB VI	PENUTUP	
61.	Kesimpulan.....	97
62.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 2014 S/D 2018 UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.....	3
Tabel 1.2	Data Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Mengikuti Pelaksanaan Program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Periode 22 Oktober S/D 30 November 2018.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2.2	Konsep Operasional	29
Tabel 3.1	Jumlah populasi dan sampel	34
Tabel 5.1	Skala dan klasifikasi pengukuran efektivitas pelaksanaan program.....	50
Tabel 5.2	Penggolongan jenis kelamin	52
Tabel 5.3	Penggolongan umur responden.....	52
Tabel 5.4	Penggolongan tingkat pendidikan.....	53
Tabel 5.5	Jawaban responden yang terbantu dalam melakukan perubahan atas kepemilikan kendaraan bermotor dengan adanya program pemutihan.....	56
Tabel 5.6	Jawaban responden yang hanya akan melakukan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor jika pemerintah melaksanakan program pemutihan	57
Tabel 5.7	Jawaban responden mengenai adanya program pemutihan dapat meningkatkan pendapatan BBN-KB daerah	59
Tabel 5.8	Rekapitulasi pilihan responden dengan indikator ketepatan sasaran program	60
Tabel 5.9	Jawaban responden mengenai apakah pernah mendengar tentang program pemutihan melalui berita, tv, radio, koran atau sosial media	63
Tabel 5.10	Jawaban responden mengenai apakah efektif sosialisasi program pemutihan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau.....	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.11	Jawaban responden apakah setuju Pemerintah Provinsi Riau membuat program pemutihan	66
Tabel 5.12	Jawaban responden mengenai usaha mencari informasi tentang program pemutihan	67
Tabel 5.13	Jawaban responden apakah merasa kesulitan memenuhi persyaratan dan tata cara dalam mengikuti program pemutihan.....	69
Tabel 5.14	Rekapitulasi pilihan responden dengan indikator sosialisasi program.....	70
Tabel 5.15	Jawaban responden mengenai adanya program pemutihan dapat meningkatkan kembali kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.....	73
Tabel 5.16	Jawaban responden apakah setuju membayar pajak itu penting	76
Tabel 5.17	Jawaban responden mengenai membayar pajak tepat pada waktunya.....	77
Tabel 5.18	Jawaban responden mengenai adanya program pemutihan dapat mengoptimalkan pajak daerah.....	79
Tabel 5.19	Rekapitulasi pilihan responden dengan indikator tujuan program	79
Tabel 5.20	Jawaban responden mengenai tujuan dan sasaran awal program pemutihan apakah sudah tercapai.....	81
Tabel 5.21	Jawaban responden mengenai program pemutihan yang dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana dengan baik.....	83
Tabel 5.22	Jawaban responden mengenai usaha dalam memanfaatkan adanya program pemutihan dengan baik	84
Tabel 5.23	Jawaban responden mengenai masyarakat selalu membayar pajak.....	86
Tabel 5.24	Rekapitulasi pilihan responden dengan indikator pemantauan program.....	88
Tabel 5.25	Rekapitulasi jawaban responden mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan cara suatu negara untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakatnya. Didalam pembangunan nasional tersebut dibutuhkan dana yang besar sebagai penunjang agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan negara tersebut. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahunnya. Berbagai macam pembangunan nasional yang sudah dilakukan sejak kemerdekaan sampai saat ini semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa ini. Penerimaan negara dibagi menjadi dua yaitu, penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan bukan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dan sektor pajak sangat diandalkan dalam pembangunan dan pembiayaan negara. Oleh sebab itu pemerintah terus menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak ini. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Selain itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara.

Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan yang lainnya. Saat ini perarikan pajak daerah telah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu



dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat vital. Peranan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang utama disamping dana perimbangan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam akan sangat menentukan kekuatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut tercermin dengan diundangkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain memberi kewenangan yang lebih besar melalui, perluasan jenis dan cakupan pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian fleksibilitas bagi daerah untuk memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Dijelaskan dan Undang-undang bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang ada dipulau sumatra. Dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerahnya, Provinsi Riau mendapatkan sumber pendapatan daerah terbesar melalui sektor pajak. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak terbesar di Provinsi Riau ini yaitu berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam pelaksanaan pemungutannya Pemerintahan Provinsi Riau dibantu oleh 33 Unit Pelaksana Teknis SAMSAT yang ada diseluruh Kabupaten/Kota di Riau.

Pemerintahan Provinsi Riau dalam melaksanakan otonomi daerahnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) yang merupakan dasar hukum dari penelitian ini. Program ini dilaksanakan selama 5 pekan yaitu mulai tanggal 22 Oktober hingga 30 November 2018. Penghapusan sanksi administrasi ini dilakukan diseluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) SAMSAT yang ada diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Program Penghapusan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat Provinsi Riau dalam kemudahan membayar pajak. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan begitu program ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan kendaraan di Provinsi Riau. Karena pada program ini sanksi administrasi yang ada pada proses balik nama kendaraan bermotor akan dihapuskan.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 2014 S/D 2018 UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota

TAHUN	TARGET BBNKB	REALISASI BBNKB	PERSENTASE	UNIT
2014	Rp465.341.887.273	Rp483.882.542.280	103,98%	91.106
2015	Rp552.114.160.256	Rp422.686.956.008	76,56%	81.039
2016	Rp472.678.300.409	Rp339.114.090.007	71,74%	51.778
2017	Rp465.315.115.799	Rp400.524.344.290	86,08%	61.767
2018	Rp452.469.987.402	Rp627.015.180.385	138,58%	87.891

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Data 2018. Penelitian 2020
Berdasarkan tabel 1.1 data rekapitulasi target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 2014 S/D 2018 UPT Pengelolaan Pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan dari sektor pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mengalami fluktuasi. Namun dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi BBN-KB sangat meningkat mencapai Rp627.015.180.385 miliar atau dengan persentase 138,58%. Berdasarkan angka tersebut bahwa pelaksanaan program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi BBN-KB berhasil melampaui target awal yang ditentukan.

Tabel 1.2 Data Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Mengikuti Pelaksanaan Program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Periode 22 Oktober S/D 30 November 2018

NO	GOLONGAN KENDARAAN	UNIT
1	BUS	2
2	JEEP	302
3	LIGHT TRUCK	43
4	MICROBUS	20
5	MINIBUS	1.354
6	PICK UP	512
7	SEDAN	214
8	SPD. MOTOR R2	4.402
9	SPD. MOTOR R3	1
10	TRUCK	277
JUMLAH		7.127

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Data 2018. Penelitian 2020
 Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat jumlah seluruh wajib pajak (masyarakat)

dan golongan kendaraannya yang mengikuti program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang merupakan perwujudan dari dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2018. Dapat dilihat pula wajib pajak yang mengikuti program program ini mencapai 7.127 orang, ini merupakan wujud antusias masyarakat dalam memanfaatkan program ini dengan sabaik-baiknya. Namun masih banyak lagi masyarakat yang tidak memanfaatkan program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diberikan oleh Provinsi Riau. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah tidak melaksanakan program seperti ini setiap tahunnya, melainkan jarang sekali. Karena jika pemerintah memberikan pembebasan/penghapusan pajak setiap tahunnya maka ini akan berdampak buruk kepada masyarakat, contohnya adalah menjadi malasnya masyarakat membayar pajak serta masyarakat menjadi tidak taat dalam membayar pajak.

Adapun sebagian masyarakat yang tidak memanfaatkan program pembebasan/penghapusan ini yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau dikarenakan mungkin masyarakat yang tidak mengetahui informasi akan adanya program pembebasan/penghapusan atau masyarakat yang belum mempunyai dana untuk membayar pajak pada waktu yang bersamaan dilaksankannya Peraturan Gubernur Riau ini.

Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dengan memilih judul “Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota).

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan membahas penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)?

2. Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBNKB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota).
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru dalam menambah pengetahuan dan wawasan dibidang administrasi negara khususnya yaitu dibidang perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2. Manfaat praktis

- a. Bagi mahasiswa penelitian ini mengajarkan tentang cara pengaplikasian teori yang telah didapat selama dibangku perkuliahan.
- b. Bagi instansi penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan masukan bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.
- c. Bagi Kampus UIN SUSKA Riau diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan tambahan bacaan bagi mahasiswa yang lainnya.

1. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teoritis, pengertian efektivitas, ukuran efektivitas, pajak, pajak daerah, bea balik nama kendaraan bermotor, penghapusan sanksi administrasi, menurut pandangan islam, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pemilihan informan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan keadaan umum UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian.

UIN SUSKA RIAU



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

Makmur (2011:5) berpendapat efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampilkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Maka dengan demikian efektivitas dapat kita katakan sebagai ketetapan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilannya dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya (Sondang P Siagian, 2008:4).

Menurut Streers yang dikutip Hall, efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun Stoner memberikan definisi efektivitas sebagai kemampuan menentukan tercapainya tujuan, yakni mengerjakan sesuatu dengan benar (tujuan) bukan mengerjakan suatu yang benar (cara) (Choirul, 2008:6).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun menurut Mahmudi (2005:92), efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas befokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely.

Dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kesatuan yang saling melengkapi untuk dapat mencapai tujuan dan keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, baik dari organisasi pemerintah ataupun organisasi dalam dunia bisnis.

2.2 Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas dapat diukur dan dilihat dari suatu kebijakan atau program yang dilakukan atau diterapkan. Adapun indikator pengukuran efektivitas program yang dikemukakan oleh Makmur (2011:7) yaitu:

1. Ketetapan pengukuran waktu. Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Ketetapan perhitungan biaya. Ketetapan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan itu dapat diselesaikan. Ketetapan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran. Ketepatan pengukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik.
5. Ketepatan berfikir. Ketetapan berfikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan suatu aktivitas organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh seorang pemimpin salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel yaitu:

1. Ketetapan sasaran program

Sejauh mana program atau kebijakan yang dilakukan tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran serta program pada khususnya.

3. Tujuan program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan program

Sejauh mana pengawasan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Campbell (1973) mengenai berbagai ukuran yang digunakan untuk menentukan keberhasilan organisasi yaitu berjumlah sembilan belas variabel yang digunakan secara luas. Yang paling menonjol diantaranya adalah: (1) keseluruhan prestasi, (2) produktivitas, (3) kepuasan kerja pegawai, (4) laba dan tingkat penghasilan dari penanaman modal, dan (5) keluarnya karyawan.

Berdasarkan pemaparan ukuran-ukuran efektivitas diatas, penulis mengadopsi ukuran efektivitas Budiani, konsep inilah yang akan digunakan penulis dilapangan untuk melihat efektivitas kebijakan penghapusan sanksi administrasi BBN-KB di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

2.3 Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran



umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sany Devano, 2006:22).

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2007).

Undang-undang perpajakan sendiri memberikan definisi dalam pengertian umum yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Ida Zuraida, 2011: 4).

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang tujuannya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dalam situasi ini rakyat tidak dapat merasakan manfaat dari pajak yang dibayar secara langsung, karena pajak akan dikelola pemerintah untuk masyarakat dan kepentingan umum.

2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi pajak *budgetair* dan fungsi *regulerend* (Sony Devano, 2006: 25).

1) Fungsi Budgetair

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

2) Fungsi Regulerend

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi

tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan dikenal *self assesment system*, *official assessment system*, dan *withholding tax system*.

- 1) *Self assesment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Rimsky K. Judisseno mengatakan bahwa *Self assesment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang.
- 2) *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- 3) *Withholding assessment system* merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undang untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak,



penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi palanggaran perpajakan, seperti halnya pada *self assesment system*.

2.6 Pajak Daerah

Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pengaturan mengenai pungutan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah (Darwin, 2010:99).

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Marihot P. Siahaan (2004: 51-52) Pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah oleh wajib pajak yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara



langsung yang telah diatur dalam Undang-undang. Pajak daerah adalah pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan daerah yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah yaitu:

A. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

B. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



2.7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Riau No 19 Tahun 2018, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah (termasuk hibah wasiat dan hadiah), warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha (Marihot P. Siahaan, 2005:168).

2.7.1 Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada BBNKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor (Marihot P. Siahaan, 2005:171).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang BBNKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

2.7.2 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan diair dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) menurut (Marihot P. Siahaan 2010: 180). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor:

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.



2.7.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Bab IV mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Pasal 14 Perda Riau Nomor 8 Tahun 2011:

- 1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- 2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- 3) Dalam hal Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Isi silinder dan/atau satuan daya kendaraan bermotor.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor.
 - c. Jenis dan type kendaraan bermotor.
 - d. Merek kendaraan bermotor.
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 15 Perda Riau Nomor 8 Tahun 2011:

- 1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena hibah dan warisan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat masing-masing ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
 - c. Penyerahan karena hibah dan warisan sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen).

Pasal 17 Perda Riau Nomor 8 Tahun 2011:

Besaran pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dengan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.



2.8 Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Bedasarkan Pergub No 19 Tahun 2018, Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan penyampaian Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) berupa kenaikan sebesar 25% {dua puluh lima persen) dan pokok pajak ditambah sanksi berupa baiaya sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, atau sanksi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang / lambat dibayar untuk Jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan akibat pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari selak ditetapkan.

Pasal 2 Pergub No 19 Tahun 2018:

- 1) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB diberikan kepada wajib pajak pemilik kendaraan bormotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum.
- 2) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB akibat mutasi masuk, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau) maupun mutasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB akibat Balik Nama, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN KB II) akibat perubahan identitas kepemilikan dalam wilayah Provinsi Riau; dan

3) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi BBN-KB penyerahan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pembebasan/penghapusan sanksi administrasi terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk.

4) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) berlaku apabila waajib pajak melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

2.9 Pajak Dalam Pandangan Islam

Pajak dalam pandangan agama islam dapat dikenakan kepada wajib pajak, pajak ditarik atas dasar pengenaan terhadap subjek pajak. Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai kewenangan untuk menarik pajak menurut Gusfahmi (2007). Alasan kaum muslimin memunaikan pajak yang ditetapkan negara adalah karena sebagai kebaikan dan taqwa yang harus dipenuhi sebagai warga negara.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Qs. Al-Baqarah:195)

Maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin di indonesia), yaitu kewajiban dalam menunaikan zakat dan pajak sekaligus.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam skripsi maupun proposal yang berisikan informasi tentang metode-metode serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang ingin penulis teiti. Penelian terdahulu sekaligus menghindari plagiasi, repetisi dan duplikasi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Pungky Dwi Martadani, Diana Hertati	Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada unit pelaksana teknis badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang	Hasil penelitian dari indikator efisiensi bahwa efisiensi dalam pelaksanaan program pemutihan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang dikatakan sudah efisien karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan memanfaatkan adanya program pemutihan tersebut serta dapat meningkatkan penerimaan pajak. Indikator kecukupan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Hasil
2	Luh Dina Ekasari, Febrian Akbari	Tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pajak daerah (studi pada unit pelaksana teknis dinas pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	dan mendapat dukungan dari wajib pajak. karena indikator kecukupan tersebut di rasa sudah efektif. Masyarakat berpendapat program pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup memenuhi harapan dan mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat.
3	Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjandlin Domai, Minto Hadi	Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Nganjuk)	Bedasarkan analisis rasio efektivitas pajak daerah, efektivitas atas penerimaan pajak kendraan bermotor tahun 2016 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif karena melebihi 100%, yaitu sebesar 108,18%. Berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan pajak kendaraan bermotor dan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor serta perbandingan sebelum dan pada saat penerapan kebijakan pemutihan menunjukan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Provinsin Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
			Bedasarkan fokus penelitian yang ditetapkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk berdasar ketentuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah 0,2% - 1,5% untuk pajak, 2% - 3,5% untuk progresif dan 0,75% - 15% untuk bea balik nama yang dipungut berdasarkan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui, pendartaran, pendataan, penetapan, pembayaran, dan penyerahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Hasil
© Hak cipta milik UIN Suska Riau			yang telah menunjukkan hasil sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan telah berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melampaui target. Dilihat target dan realisasi serta tingkat pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor baik itu dari segi objek maupun penerimaan pajak pada bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2012 sudah mencapai target.
4	Cinti Rahayu, Amirah	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes)	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh sebesar 95,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini, misalnya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.
5	Arin Fitriani	EFEKTIFITAS PROGRAM	Hasil penelitian dan perhitungan secara statistik dari indikator efisiensi terhadap

No	Nama	Judul	Hasil
© Hak cipta milik UIN Suska Riau		PEMBERIAN KERINGANAN INSENTIF PAJAK DAERAH TAHUN 2017 DI KABUPATEN MOJOKERTO (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kecamatan Kranggan)	program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto responden memberikan respon positif yang memperoleh persentase skot total 76% dan termasuk dalam kategori efektif. Secara keseluruhan responden berpendapat program pemberian keringanan cukup efektif untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Indikator kecukupan dari program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto mendapatkan respon positif dari responden dan memperoleh persentase skot total 78% yang termasuk dalam kategori efektif. Responden berpendapat program pemberian keringanan insentif pajak daerah cukup memenuhi harapan dan mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat. Pelaksanaan program pemberian keringanan insentif pajak daerah tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto dalam indikator perataan memperoleh skot total 79% yang termasuk dalam kategori efektif

2.11 Defenisi Konsep

Untuk memberikan kesamaan pandangan tentang permasalahan penelitian maka penulis memberikan defenisi konsep tentang beberapa variabel penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah suatu kesatuan yang saling melengkapi untuk dapat mencapai tujuan dan keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam sebuah organisasi, baik dari organisasi pemerintah ataupun organisasi dalam dunia bisnis.

2. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah provinsi/kabupaten yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk pemenuhan pembiayaan dan keperluan daerah.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak.
5. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi adalah pemberian pengampunan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II akibat perubahan identitas kepemilikan dalam wilayah Provinsi Riau.

2.1 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan atau rincian-rincian atau kegiatan operasional dan diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya maka



dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai, yaitu: diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pengukuran Efektivitas Program Menurut Budiani (2007:53)	Ketepatan Sasaran Program	1. Membantu masyarakat atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. 2. Peningkatan pendapatan BBN-KB
	Sosialisasi Program	1. Penghapusan sanksi administrasi BBN-KB. 2. Tata cara dan syarat penghapusan sanksi administrasi BBN-KB.
	Tujuan Pogram	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. 2. Mengoptimalkan pajak daerah.
	Pemantauan Program	1. Tercapainya tujuan dan sasaran awal program 2. Pemanfaatan program penghapusan sanksi administrasi BBN-KB

Sumber: Teori Efektivitas Ni Wayan Budiani (2007:53)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Berfikir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

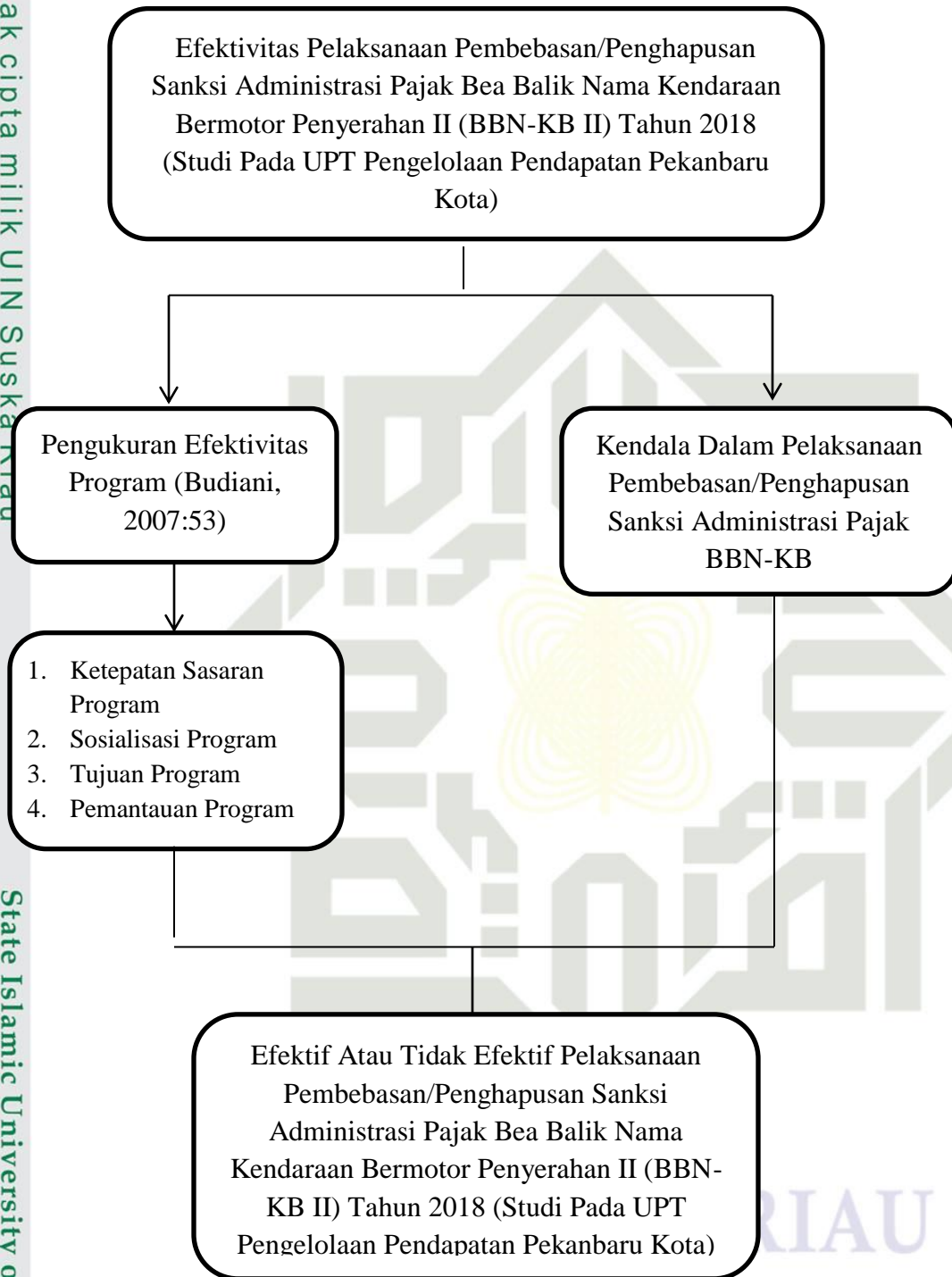
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Sugiyono (2011:11) memaparkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain

Alasan penulis dalam menggunakan metode kualitatif adalah karena metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penulis sendiri.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Martono (2015:65), data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui utama (seperti informan melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung dari kantor SAMSAT UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota dengan cara melakukan wawancara dengan responden terpilih dan dengan cara menyebarkan kuesioner. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, agar membantu berjalannya wawancara dengan baik dan tidak keluar dari konflik dan tujuan yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Martono (2015:66) menjelaskan bahwa dalam mengemukakan data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, penulis berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Maksudnya memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam hal ini seperti data berita, jurnal, buku-buku dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk melengkapi data primer.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas (Husaini Usman, 2009: 42). Populasi dalam penelitian ini adalah kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para PNS dan P3K di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota serta wajib pajak yang membayar pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Etta Mamang Sangadji (2010:186) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus slovin, dimana penempatan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel dan populasi.

Berikut rumus slovin:

$$n = \frac{n}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel/Responden Penelitian

N = Jumlah Populasi Secara Keseluruhan

e² = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (10%)

Pada penelitian ini jumlah responden yang digunakan sebanyak 100 orang, maka berdasarkan rumus slovin pengambilan sampel dari jumlah angket yang diedarkan minimal adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{n}{1 + N(e)^2}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{7.127}{1 + 7.127 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{7.127}{1 + 7.127 (0,01)}$$

$$n = \frac{7.127}{72,27}$$

$$n = 98,61$$

Kemudian jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 98,61 yang dibulatkan menjadi 100 orang. Sampel yang diambil adalah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota

Tabel 3.1 jumlah populasi dan sampel

NO	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel
1	UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota		
	a. Sub Bagian Tata Usaha	1	1
	b. Seksi Penerimaan	1	1
	c. Seksi Pengawasan dan Pembukuan	1	1
2	Wajib Pajak (Masyarakat)	7.127	100
	Jumlah	7130	103

Sebagai key informan pada penelitian ini adalah satu orang pada Seksi Penagihan, satu orang pada Seksi Penerimaan dan satu orang pada Seksi Pengawasan dan Pembukuan serta wajib pajak (masyarakat) yang dijadikan responden melalui angket.

Pada penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Aksidental Sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebetulan, yang mana siapa saja wajib pajak yang pantas menurut penulis dijadikan sebagai sampel.

3.4 Objek Penelitian

Obyek penelitian ini dilakukan di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru

Kota. UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota beralamatkan di JL. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru 28116, Telp. (0761) 22883.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mendapatkan data-data lapangan.

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya) (Husaini Usman, 2009: 52). Kemudian didalam penelitian ini penulis melakukan observasi terlebih dahulu untuk mencari masalah terkait penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee* (Husaini Usman, 2009:55). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam, ini bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. Pihak yang akan diwawancarai adalah personal yang berhubungan dengan tingkat penerimaan pajak dan kebijakan pengampunan denda pajak di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lainnya. Dokumen yang berbentuk karya seni misalnya gambar, film dan sebagainya (Sugiyono, 2011: 329-330).

d. Kuesioner (Angket)

Juliansyah Noor (2011:139) berpendapat kuesioner/angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka, yaitu jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya oleh peneliti dan dapat bersifat tertutup, yaitu alternatif jawaban telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Adapun instrumen daftar pertanyaan dapat berupa pertanyaan (berupa isian yang akan diisi oleh responden), *checklist* (berupa pilihan dengan cara memberi tanda pada kolom yang disediakan), dan skala (berupa pilihan dengan memberi tanda pada kolom berdasarkan tingkatan tertentu).



3.6 Skala Pengukuran (*Skala Likert*)

Kemudian Juliansyah Noor (2011:128) skala likert merupakan teknik mengukur sikap dimana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pernyataan. Skala likert merupakan salah satu teknik pengukuran sikap yang paling sering digunakan dalam riset pemasaran. Dalam pembuatan skala likert, periset membuat beberapa pernyataan yang berhubungan suatu isu dan objek, lalu subjek atau responden diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pernyataan.

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Berikut merupakan skala likert yang dibuat dalam pilihan ganda serta skor penilaiannya antara lain:

- | | |
|------------------|-----|
| a. Sangat Setuju | (4) |
| b. Setuju | (3) |
| c. Kurang Setuju | (2) |
| d. Tidak Setuju | (1) |

3.7 Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data artinya analisis data bersifat (*iteratif*) berkelanjutan. Untuk penelitian ini menunjukan pada riset yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan hanya berbentuk penjelasan yang menggambarkan peristiwa, proses dan keadaan tertentu.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

a. Reduksi Data

Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan tentang hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota), adapun kesimpulan dari hasil penyebaran kuisioner dan wawancara dilapangan dengan menggunakan 4 (empat) ukuran indikator menurut Budiani (2007:53) belum dapat dikatakan efektif karena pada indikator sosialisasi program, informasi mengenai program pembebasan/penghapusan pajak ini belum sepenuhnya didengar oleh masyarakat.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini mengenai kendala-kendala dalam proses pelaksanaan Pergub Riau Nomor 19 Tahun 2018 pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota yang telah terlaksana selama 5 (lima) minggu adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya komputer sebagai sarana dan pra sarana dalam proses pembayaran pajak mengakibatkan terjadinya penumpukan wajib pajak. Hal ini tentunya tidak efektif waktu bagi wajib pajak dan penyedia layanan pada kantor sendiri.
2. Menumpuknya wajib pajak juga dikarenakan tingginya antusias masyarakat dalam mengikuti program pemutihan pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sistem yang tidak terbaca maksudnya adalah tidak terdaptarnya Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) pada situs atau komputer. Hal ini biasanya disebabkan karena kendaraan yang sudah lama tidak bayar pajak atau kendaraan tahun rendah.

Berdasarkan hasil penelitian dari keempat indikator diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak BBN-KB pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota belum dapat dikatakan efektif.

Sementara kendala dari wajib pajak (masyarakat) dalam mengikuti program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak BBN-KB adalah sebagai berikut:

1. Kendala dalam masalah financial dari masyarakat yang ingin mengikuti program pembebasan/penghapusan pajak kendaraan bermotor.
2. Terkendala dengan waktu dalam mengikuti program pembebasan/penghapusan pajak kendaraan bermotor.
3. Kendala pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masyarakat yang masih di *leasing* atau dalam proses kredit.

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran kepada pihak instansi terkait Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota) adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Menambah unit komputer pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota agar terciptanya pelayanan pembayaran pajak yang tertib dan efisien.

2. Menciptakan suasana tertib pada pelayanan pembayaran pajak

3. Memperbaiki sistem yang tidak terbaca agar tidak terjadi kesalahan dan salah paham dalam proses pembayaran pajak oleh masyarakat.

Adapun saran yang hendak diberikan oleh penulis kepada masyarakat (wajib pajak) adalah sebagai berikut:

1. Sadar dan taat tentang pentingnya dalam membayar pajak.

2. Lebih peka terhadap informasi mengenai adanya program pemutihan pajak atau sejenisnya.

3. Memahami persyaratan yang harus dipenuhi dalam membayar pajak.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 195.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gufahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Refika Aditama, Jakarta.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi, Cetakan Kedua*, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, PT Alfabet, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, PT Alfabet, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Salemba Empat, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusus, Choirul Fuad. 2008. *Efektivitas Pokjawas Dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam, Cetakan I*, Pena Citasatria, Jakarta.

Zuraida, Ida dan Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiha. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.

Peraturan:

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II).

Jurnal dan Skripsi

Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Input*, Vol. 2 (1) : 49-57.

Dina Ekasari, Luh dan Febriana Akbari. 2016. Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota).

Dwi Martadani, Pungky dan Diana Hertati. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. Vol 1 (1) : 35-48.

Fatin Irfandy, Taufik dan Thahjanulin Domai dan Minto Hadi. 2012. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk). Vol 1 No 4, Hal 194-202.

Fatin Irfandy, Taufik dan Thahjanulin Domai dan Minto Hadi. 2012. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk). Vol 1 No 4, Hal 194-202.

Fitriani, Arin. 2017. Efektivitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Mojokerto (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kecamatan Kranggan).



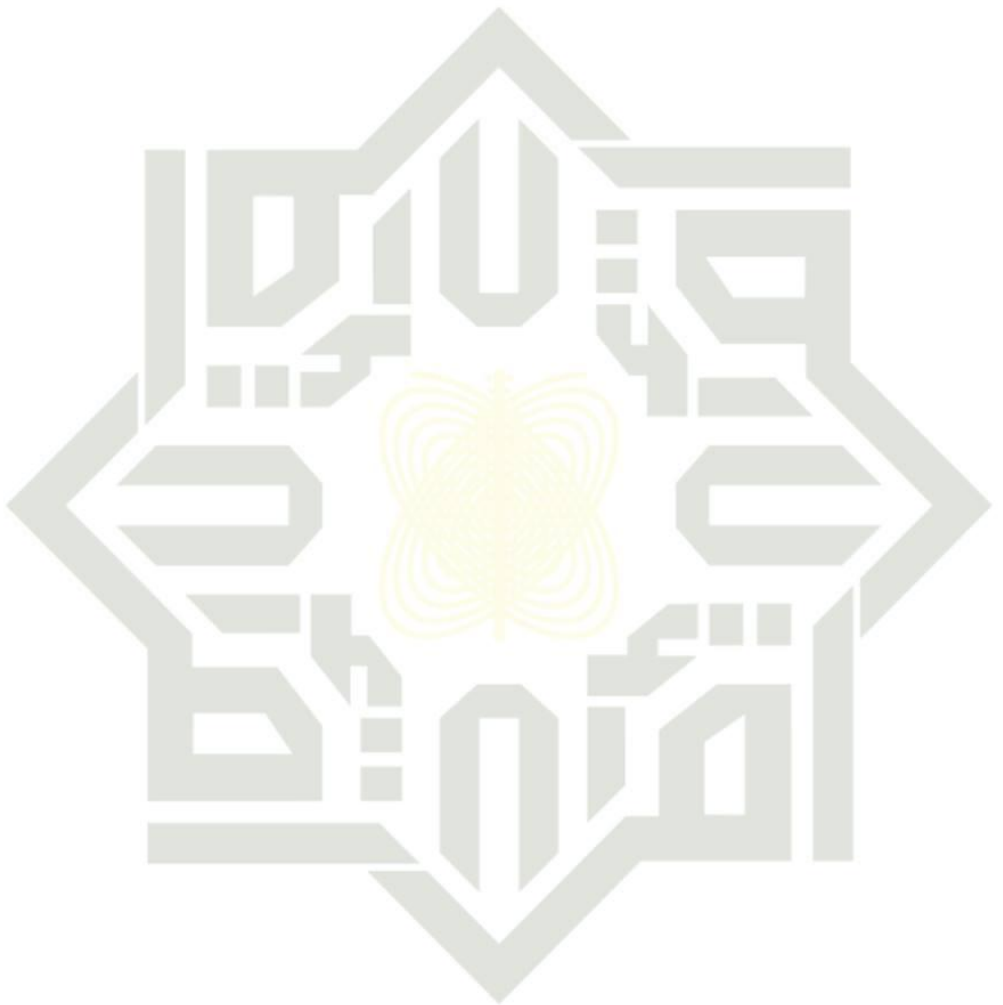
Rahayu Cinti dan Amirah. 2018. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). Vol X No 1, Hal 1-14.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

Indikator (Ketetapan Sasaran Program)

A. Membantu Masyarakat Atas Perubahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

1. Apakah tercapai program pemutihan BBN-KB dalam membantu masyarakat atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor?
2. Apakah masyarakat hanya akan membayar pajak jika pemerintah melaksanakan program pemutihan BBN-KB?
3. Mengapa masyarakat tidak taat membayar pajak?

B. Peningkatan Pendapatan BBN-KB

1. Apakah dengan adanya program pemutihan BBN-KB membuat realisasi BBN-KB meningkat?
2. Apakah tujuan dari peningkatan pendapatan BBN-KB?
3. Apakah setiap adanya program pemutihan diikuti dengan peningkatan pajak BBN-KB?

Indikator (Sosialisasi Program)

C. Penghapusan Sanksi Administrasi BBN-KB

1. Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan sosialisasi program pemutihan BBN-KB?
2. Apakah efektif sosialisasi program pemutihan BBN-KB yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau?
3. Apakah anda setuju Pemerintah Provinsi Riau membuat program pemutihan pajak BBN-KB?
4. Apakah banyak masyarakat yang mengetahui program pemutihan BBN-KB?

D. Tata Cara dan Syarat Penghapusan Sanksi Administrasi BBN-KB

1. Bagaimana tata cara dan syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi masyarakat dalam mengikuti program pemutihan pajak BBN-KB?
2. Apakah masyarakat mengalami kesulitan dengan tata cara dan syarat dalam mengikuti program pemutihan pajak BBN-KB?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah terdapat perbedaan tata cara dan syarat dalam mengikuti program pemutihan pajak BBN-KB dengan yang tidak mengikuti program?

Indikator (Tujuan Program)

E. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak

1. Apakah dengan adanya program pemutihan BBN-KB meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kembali?
2. Bagaimanakah usaha Pemprov Riau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak?
3. Apakah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya?
4. Apakah membayar pajak itu penting?

F. Mengoptimalkan Pajak Daerah

1. Apakah dengan adanya program pemutihan BBN-KB dapat mengoptimalkan pajak daerah?
2. Apakah tujuan dari optimalnya pajak daerah?
3. Kapanakah pajak daerah dikatakan optimal?

G. Tercapainya Tujuan dan Sasaran Awal Program

1. Apakah tujuan dan sasaran awal program pemutihan pajak BBN-KB sudah tercapai?
2. Apakah program pemutihan BBN-KB sudah terlaksana baik kepada masyarakat?
3. Apakah faktor penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran awal program?

H. Pemanfaatan Program Penghapusan Sanksi Administrasi

1. Apakah masyarakat berusaha memanfaatkan program pemutihan pajak BBN-KB dengan baik?
2. Bagaimanakah dengan masyarakat yang tidak memanfaatkan program pemutihan?

I. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan BBN-KB

1. Apa saja kendala dari masyarakat yang dialami dalam proses pelaksanaan program pemutihan BBN-KB?
2. Apa saja kendala dari kantor yang dialami dalam proses pelaksanaan program pemutihan BBN-KB?



Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBNKB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota).

Identitas Peneliti

Nama : Rhama Yudhiansyah Putra
NIM : 11675101889
Jurusan : Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU

Identitas Responden

Nama :
TEL :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :

Indikator (Ketepatan Sasaran Program)

A. Membantu Masyarakat Atas Perubahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

1. Apakah anda setuju terbantu dalam melakukan perubahan atas kepemilikan kendaraan bermotor dengan adanya program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II)?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
2. Apakah anda hanya akan melakukan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor jika pemerintah melaksanakan program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II)?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kurang Setuju
- d. Tidak Setuju

B. Peningkatan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

1. Apakah menurut anda dengan adanya program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) dapat meningkatkan pendapatan BBN-KB daerah?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju

Indikator (Sosialisasi Program)

A. Penghapusan Sanksi Administrasi BBN-KB.

1. Apakah anda pernah mendengar tentang program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) melalui berita, tv, radio, koran atau sosial media?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak Pernah
2. Apakah efektif sosialisasi program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
3. Apakah anda Setuju Pemerintah Provinsi Riau membuat program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II)?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju

4. Apakah anda berusaha mencari informasi tentang program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II)?

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Tidak Pernah

B. Tata Cara dan Syarat Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi BBN-KB.

1. Apakah anda merasa kesulitan dengan tata cara dan syarat dalam mengikuti program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II)?

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Tidak Pernah

Indikator (Tujuan Program)

A. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak

1. Apakah anda setuju dengan adanya program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) dapat meningkatkan kesadaran anda dalam membayar pajak kembali?

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa membayar pajak itu penting?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Kurang Setuju
- d. Tidak Setuju

3. Apakah anda membayar pajak tepat pada waktunya?

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-Kadang
- d. Tidak Pernah

B. Mengoptimalkan Pajak Daerah

1. Apakah anda setuju dengan adanya program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) untuk mengoptimalkan pajak daerah?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Kurang Setuju
- d. Tidak Setuju

Indikator (Pemantauan Program)

A. Tercapainya Tujuan dan Sasaran Awal Program.

1. Apakah anda setuju tujuan dan sasaran awal program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) sudah tercapai?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Kurang Setuju
- d. Tidak Setuju

2. Apakah anda setuju bahwa program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah terlaksana dengan baik?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Kurang Setuju
- d. Tidak Setuju

B. Pemanfaatan Program Penghapusan Sanksi Administrasi BBN-KB.

1. Apakah anda setuju akan memanfaatkan program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) dengan baik?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
2. Apakah anda setuju tidak akan membayar pajak jika tidak ada program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II)
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju

UIN SUSKA RIAU



milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28634
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7389/2019 Tanggal 5 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RHAMA YUDHIANSYAH PUTRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11675101889 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBEBASAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II (BBN-KB II) TAHUN 2018 (STUDI PADA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3621



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/28634 tanggal 10 Desember 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **RHAMA YUDHIANSYAH PUTRA**
2. NIM : **11675101889**
3. Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **DESA TANAH DATAR KEC. KUNTO DARUSSALAM-ROKAN HULU**
7. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBEBASAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II (BBN-KB II) TAHUN 2018 (STUDI PADA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA PEKANBARU)**
8. Lokasi Penelitian : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si
Pembina
NIP. 19690701 198909 1 001

Tembusan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
 Jalan. Gajah Mada Nomor : 200 telpon (0761) 22883 Pekanbaru

SURAT KETERANGAN

Nomor :423/BAPENDA/UPT.01/ 03

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA HEDAYENI, SE
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
 NIP : 19650610 198903 2 007
 Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RHAMA YUDHIANSYAH PUTRA
 NIM : 11675101889
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas : Uin Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa benar Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Riset di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA UPT PENGELOLAAN
 PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
 BAPENDA PROV. RIAU,



EKA HEDAYENI, SE
 Penata Tk. I
 Nip. 19650610 198903 2 007

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBEBASAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II (BBN-KB II)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah, perlu memberikan insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan/ penghapusan sanksi administrasi pajak;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 54 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangan perpajakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN- KB II);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 -

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II (BBN-KB II).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengan nya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3 -

digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang Angkutan Umum Orang atau Barang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku serta dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan penyampaian Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi berupa biaya sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, atau sanksi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang / lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan akibat pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

BAB II BATASAN

Pasal 2

- (1) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB diberikan kepada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum.
- (2) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 -

- a. pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB akibat mutasi masuk, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau) maupun mutasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau;
 - b. pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB akibat Balik Nama, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II) akibat perubahan identitas kepemilikan dalam wilayah Provinsi Riau; dan
 - c. pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang menunggak sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.
- (3) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi BBN-KB penyerahan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pembebasan/penghapusan sanksi administrasi terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk.
 - (4) Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila wajib pajak melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Pembayaran pokok pajak BBN-KB II dan PKB yang telah mendapatkan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan berakhirnya masa periode pelaksanaan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II.
- (2) Apabila pembayaran pokok pajak melawati jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), pembebasan/penghapusan sanksi administrasi dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

BAB III MEKANISME

Pasal 4

- (1) Perhitungan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan perhitungan pada sistem/aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN -KB dilaksanakan pada Kantor bersama SAMSAT di Wilayah Provinsi Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 -

- (3) Pelayanan Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan dan melampirkan :
- a. permohonan secara tertulis kepada Gubernur Riau, sebagaimana format lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. identitas diri;
 - c. identitas kepemilikan kendaraan yang sah; dan
 - d. surat dan/atau bukti yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MASA PELAKSANAAN

Pasal 5

Masa pelaksanaan pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 April 2018

Pt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 April 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HJAZI

Disalinkan tanggal 24 September 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
No. 19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR: 20

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

Jalan Gajah Mada No. 200 Telp. (0761) 22883 - Pekanbaru

REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
2014 S/D 2018

NO	TAHUN	TARGET BBNKB (Rp)	REALISASI BBNKB (Rp)	PERSENTASE (%)	UNIT
1	2	3	4	5	6
1	2014	465.341.887.273,00	483.882.542.280,00	103.98	94.106
2	2015	552.114.160.256,63	422.686.956.008,00	76.56	81.039
3	2016	472.678.300.409,70	339.114.090.007,00	71.74	51.778
4	2017	465.315.115.799,64	400.524.344.290,00	86.08	61.767
5	2018	452.469.987.402,11	627.015.180.385,00	138.58	87.891

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih.

Pekanbaru, 10 Januari 2020

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
BAPENDA PROVINSI RIAU,



EKA HEDAYENI, SE
PENATA TK. I

NIP. 19650610 198903 2 007

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
Jalan Gajah Mada No. 200 Telp. (0761) 22883 - Pekanbaru

DATA REKAPITULASI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PEMBEBASAN /
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK SESUAI
PERATURAN GUBERNUR RIAU NO. 19 TAHUN 2018
TENTANG PEMBEBASAN / PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR PENYERAHAN II (BBNKB - II)
PERIODE 22 OKTOBER 2018 S/D 30 NOVEMBER 2018

NO	GOLONGAN KENDARAAN	UNIT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUS	2	
2	JEEP	302	
3	LIGHT TRUCK	43	
4	MICROBUS	20	
5	MINIBUS	1.354	
6	PICK UP	512	
7	SEDAN	214	
8	SPD. MOTOR R2	4.402	
9	SPD. MOTOR R3	1	
10	TRUCK	277	
	JUMLAH	7.127	

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih.

Pekanbaru, 10 Januari 2020

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
BAPENDA PROVINSI RIAU,



EKA HEDAYENI, SE
PENATA TK. I
NIP. 19650610 198903 2 007

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Rudy Ilhamsyah, SE M.Si

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Wan Suasty Saleh S.Sos



Wawancara dengan Ibu Murniati Sinaga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



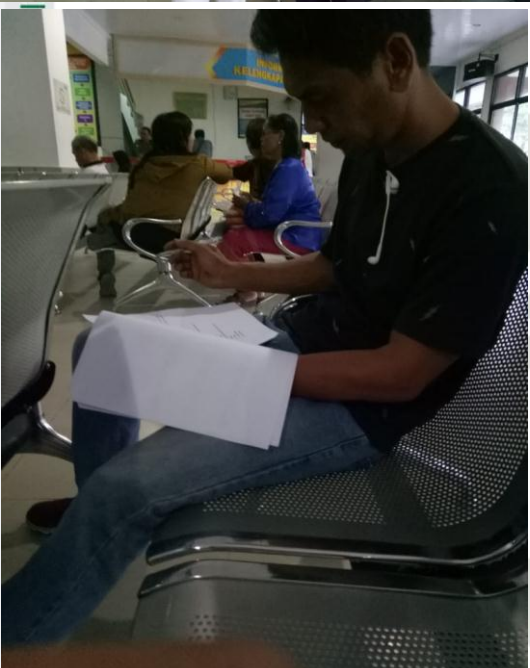
Penyebaran kuesioner/angket di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





RIWAYAT HIDUP

RHAMA YUDHIANSYAH PUTRA, Kelahiran Rimbo Makmur, 20 September 1998, anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari seorang Ibu bernama Wagiyem dan Ayah Sukamdi. Penulis memulai pendidikan di TK Kartika tamat tahun 2003, dan lanjut di SDN 022 Kunto Darussalam tamat Tahun 2010 dan melanjutkan SMPN 3 Kunto Darussalam tamat Tahun 2013, kemudian melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru tamat Tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Administrasi

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada Tahun 2019 penulis melaksanakan PKL di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota dan Pada tanggal 8 Juli 2019 sampai 29 Agustus 2019 Penulis melaksanakan KKN di Desa. Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

14 Oktober 2019 Penulis melaksanakan Seminar Proposal penelitian skripsi kemudian tanggal 25 Juni 2020 penulis melaksanakan ujian akhir sidang Munaqasah dengan judul skripsi “Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota) dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana sosial (S. Sos) dengan IPK. 3,43 dengan prediket Sangat Memuaskan.

UIN SUSKA RIAU